

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) adalah suatu standar, pedoman-pedoman, prinsip-prinsip yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah baik pusat maupun daerah. Sehingga, dengan adanya Standar Akuntansi ini maka setiap laporan keuangan pemerintah harus disusun berdasarkan standar ini. Laporan Keuangan merupakan gambaran kinerja suatu pemerintahan selama satu periode tertentu untuk memberikan informasi tentang kondisi keuangan pemerintah tersebut. Informasi ini sangat berguna untuk pihak intern maupun ekstern. Pihak intern yang membutuhkan informasi ini adalah Pemerintah itu sendiri yang digunakan untuk mengevaluasi kegiatan operasi yang telah berjalan selama satu periode, dan juga sebagai alat untuk analisis kegiatan dalam pengambilan keputusan masa yang akan datang. Pihak eksternal yang menggunakan informasi ini adalah Kreditor, Investor, Bank, Pemerintah dari daerah lain, ataupun pihak lain dari Negara asing untuk hal pinjaman luar negeri baik pusat maupun daerah.

Akuntansi sering disebut juga sebagai bahasa bisnis dalam suatu kegiatan bisnis dan bahasa pemerintahan dalam suatu aktifitas Pemerintahan yang akan disampaikan kepada pihak pengguna. Oleh karena itu Pihak Pengguna Laporan

Keuangan sangat membutuhkan informasi keuangan atau laporan keuangan yang handal.

Standar Akuntansi Pemerintah telah lama dipersyaratkan sebagai pedoman pertanggungjawaban keuangan pemerintah. Standar tersebut baru terealisasi pada saat ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2005 yang terdiri atas 11 (sebelas) pernyataan, dan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 merupakan jembatan kedua dalam akuntansi keuangan pemerintah Indonesia untuk mengantarkan dari akuntansi berbasis kas menuju akrual (cash toward accrual/CTA) ke arah akuntansi berbasis akrual penuh (full accrual), salah satu lampiran I.02 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 adalah Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) Nomor 02 mengenai Laporan Realisasi Anggaran.

Laporan Realisasi Anggaran adalah Laporan Keuangan Pemerintah yang menggambarkan semua aktifitas yang telah dianggarkan sebelumnya dengan realisasi yang terjadi dalam hal pengelolaan keuangan Pemerintah tersebut sehingga dapat dilakukan evaluasi atas kinerja yang dicapai dalam suatu daerah tersebut. Laporan Realisasi Anggaran dapat menyediakan informasi kepada para pengguna laporan tentang indikasi perolehan dan penggunaan sumber daya ekonomi yang telah dilaksanakan secara efisien, efektif, dan hemat, telah dilaksanakan sesuai dengan anggarannya (APBN/APBD), dan telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Proses penyusunan anggaran umumnya menyesuaikan peraturan yang lebih tinggi. Sejalan pemberlakuan Undang-undang No.32 tahun 2004 tentang

pemerintah daerah pada pasal 184 ayat 2 menyatakan laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) sekurang-kurangnya meliputi laporan realisasi APBD, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas laporan keuangan yang dilampiri dengan laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Selain itu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) harus disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), karena SAP bersifat mandatory (wajib) diterapkan dalam menyusun dan menyajikan LKPD, dan merupakan persyaratan yang mempunyai kekuatan hukum dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah di Indonesia.

Sebagai konsekuensinya pemerintah daerah bertanggung jawab melaporkan pengelolaan keuangan yang bersumber dari masyarakat ini dalam suatu laporan pertanggungjawaban publik. Salah satu bentuk pertanggung jawaban ini adalah anggaran dan laporan realisasi anggaran. Salah satu komponen pokok dari laporan keuangan pemerintah daerah adalah laporan realisasi anggaran. Laporan anggaran menyajikan informasi ikhtisar sumber alokasi, dan pemakaian sumber daya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah daerah yang menggambarkan perbandingan antara anggaran pendapatan, belanja dan transfer dan pembiayaan dengan realisasinya dalam satu periode pelaporan.

Informasi Laporan Realisasi Anggaran (LRA) ini sangat berguna untuk mengkaji ulang keputusan tentang alokasi sumber daya ekonomi, akuntabilitas dan kepatuhan entitas pelaporan terhadap ketentuan anggaran. Hasil akhir laporan realisasi anggaran ini yang kemudian akan dipindahkan ke neraca kelompok ekuitas dana lancar. Setiap laporan realisasi anggaran harus disusun dan

disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Laporan Realisasi Anggaran dan Standar Akuntansi Pemerintah dinyatakan dalam PSAP No.2 tentang laporan realisasi anggaran. PSAP No.2 ini berisikan prinsip-prinsip mengenai Laporan Realisasi Anggaran. Adapun tujuan Standar Laporan Realisasi Anggaran menetapkan dasar-dasar penyajian laporan realisasi anggaran untuk pemerintah dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.

Pemerintah Daerah Kabupaten Mempawah khususnya pada Badan Lingkungan Hidup sudah menyusun Laporan Realisasi Anggaran sebagai salah satu komponen Laporan Keuangan Pemerintah. Berdasarkan wawancara awal dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran ini, Badan Lingkungan Hidup dan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Mempawah sudah menerapkan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 02.

Berdasarkan uraian di atas penulis merasa tertarik dan ingin meneliti bagaimana penyajian Laporan Realisasi Anggaran yang disajikan oleh Badan Lingkungan Hidup dan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Mempawah dengan cara menganalisa Apakah telah sesuai atau belum sesuai dengan PSAP Nomor 02 PP Nomor 71 Tahun 2010. Maka dari itu, judul dari penelitian ini adalah “Analisis Penerapan PSAP NO. 2 Tentang Laporan Realisasi Anggaran Pada Badan Lingkungan Hidup dan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Mempawah”.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka penulis merumuskan masalah penelitian sebagai berikut :

1. Apakah Laporan Realisasi Anggaran Badan Lingkungan Hidup dan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Mempawah telah disusun dan disajikan sesuai dengan PSAP No.2 tentang Laporan Realisasi Anggaran ?
2. Apakah terdapat kendala dalam penyusunan Laporan Keuangan pada Badan Lingkungan Hidup dan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Mempawah ?

1.3 Pembatasan Masalah

Agar pembahasan tidak terlalu meluas dalam penelitian ini, penulis merasa perlu memberikan batasan pembahasan yaitu mengenai Laporan Realisasi Anggaran, serta pembahasan hanya untuk Laporan Realisasi Anggaran tahun 2014.

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadikan tujuan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui apakah Laporan Realisasi Anggaran pada Badan Lingkungan Hidup dan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Mempawah telah disusun sesuai dengan PSAP No.2 tentang Laporan

Realisasi Anggaran dengan cara menganalisis hasil Laporan Realisasi Anggaran pada Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Mempawah Tahun 2014.

2. Untuk mengetahui kendala yang terjadi dalam penyusunan Laporan Keuangan pada Badan Lingkungan Hidup dan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Mempawah.

1.5 Kegunaan Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Bagi Penulis

Penelitian ini dapat menjadi pengetahuan dan bermanfaat dalam memahami akuntansi pemerintahan yang berkaitan dengan penyusunan Laporan Realisasi Anggaran yang sesuai dengan PASP No.2.

2. Bagi Penulis Selanjutnya

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai sumber referensi dan informasi untuk penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan Penerapan PSAP No.2, serta untuk menyempurnakan penelitian sejenis dimasa yang akan datang.

3. Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi wacana dan referensi bagi pihak yang memerlukannya yaitu mengenai Penerapan PSAP No.2 tentang Laporan Realisasi Anggaran.